

Laporan Hasil Penelitian Kompetitif



Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.H.

HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI LAMPUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1.

*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai
imanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulanan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00
(satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan /
atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

2. *Barangsiapa dengan sengaja menjiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /
atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya
ini dengan cara apapun tanpa izin penerbit,
kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : **HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA
DI LAMPUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Penulis : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.

Cetakan Pertama : 2017

Desain Cover : Team

Layout oleh : Nurdermawan

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :

SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H. dengan judul: ***Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 265.a Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2017
**Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,**



Prof. Dr. H. M. Nador, M.Si.
NIP. 195707151987031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillah wa asy-syukru lillāh, atas limpahan nikmat, taufiq, *hidāyah* dan *ināyah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul :***Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.***

Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad saw. nabi terakhir dan tokoh pembaharu (*reformer*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Shalawat dan salam semoga tercurah juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat setianya beserta seluruh ummat sampai akhir zaman.

Saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag., Ketua LP2M. Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si, dan para staf LP2M IAIN Raden Intan Lampung, juga terima kasih kepada suami dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan keluangan waktu dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu penulis haturkan ***jazakumullāhu khairan katshiirā***

Terakhir penulis ingin menyampaikan bahwa semoga hasil penelitian ini bermanfaat walaupun masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan senantiasa penulis harapkan.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Bandar Lampung, Oktober2017

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A.....	Latar
Belakang.....	1
B.....	Rum
usanMasalah.....	5
C.....	Tuju
anPenelitian.....	5
D.....	Manf
aatPenelitian.....	6

BAB II METODE PENELITIAN

A.....	Pend
ekatanMasalah.....	7
B.....	Data
danSumber Data.....	8
C.....	Peng
umpulan Data.....	9
D.....	Peng
olahan Data.....	9
E.....	Anali
sis Data.....	10
F.....	Siste
matikaPenulisan.....	10

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A.....	P
engertianNarkoba.....	13
B.....	D
ampakPenyalahgunaanNarkoba.....	20
C.....	J
enis- jenisHukumanNarkobaPenggolonganNarkoba.....	29
D.....	P
enggolongan Narkoba.....	32
E.....	P
idanaNarkobaDalamHukumPositif.....	35
F.....	P
idanaNarkobaDalamHukum Islam.....	36
G.....	P
enyalahgunaanNarkoba di Lampung.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.....	H
ukumanMati di Indonesia.....	43
B.....	P
ro danKontraHukumanMati di Indonesia.....	46
C.....	H
ukumanMatiPengedarNarkoba.....	50
D.....	H
ukumanMatiPengedarNarkobaMenurutHukum Islam.....	58
E.....	H
ukumanMatiPengedarNarkobaDalamPerspekti f HAM.....	61
F.....	P
enerapanHukumanMatiPengedarNarkoba di Lampung.....	66

G.....	K
omparasiHukumanMatiNarkobaMenurutHuku	
m Islam danPositif.....	68

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B.....	R
ekomendasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran narkotika dan dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia menunjukkan gejala yang makin tidak terkendali. Berbagai cara ditempuh para pengedar dan bandar besar barang haram itu untuk mengelabui aparat keamanan. Ditambah lagi dengan kemasan dan teknis pengedarannya yang begitu rapih. Peredaran narkoba yang makin masif itu merupakan salah satu dampak dari era modern saat ini yang tidak diimbangi dengan pemahaman agama dan hukum.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa. Setiap tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena mengonsumsi obat berbahaya itu. Lebih parahnya lagi pengguna narkoba paling banyak itu berada di usia produktif yakni 24-30 tahun. Bahkan hingga April 2016, masih ada kurang lebih 150 narapidana narkoba di Indonesia yang sudah divonis mati tapi masih tertunda eksekusinya. Menurut Kepala BNN Komjen Budi Waseso, hukuman mati bisa memberi efek jera kepada para pengedar barang haram tersebut, apalagi Indonesia saat ini dalam posisi darurat narkoba.¹

Mirisnya lagi, secara nasional, Provinsi Lampung menempati urutan enam besar tingkat peredaran narkoba. Ditambah lagi, hampir seluruh peredaran narkoba di Sumatera melewati Lampung. Meski sudah banyak yang dihukum mati, bahkan ditembak di tempat, peredarannya masih tetap masif di Bumi Ruwa Jurai.

¹ Media Indonesia, *Percepat Eksekusi Mati 150 Mafia Narkoba*, 16 April 2016.

Di Provinsi Lampung sudah banyak pengedar dan bandar narkoba yang divonis mati. Seperti warga negara Malaysia, Leong Kim Ping alias Away, anggota jaringan internasional pemasok 45 kg sabu-sabu dan 1.700 butir pil ekstasi. Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Lampung Selatan tanpa perbedaan pendapat sepakat menjatuhkan hukuman mati. Putusan tersebut sesuai tuntutan Jaksa.

Pada persidangan, hakim menyatakan dakwaan terhadap Leong Kim Ping adalah tindak pidana narkotika yang mendapat perhatian serius pengadilan. Tindak pidana tersebut tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga pengamanannya pun harus luar biasa, termasuk penjatuhan pidana. Ditambah lagi dengan bandar narkoba koba yang ditembak mati Polda Lampung yang jumlahnya tidak sedikit.²

Narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam Islam, meskipun dalam Alquran dan Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras. Maka dalam pandangan hukum Islam, adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama.³

Zat berbahaya ini dalam pandangan hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan

² Lampung Post, *Pemilik 45 Kg Sabu Tetap Dihukum Mati*, 13 September 2012.

³ Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2010), hal. 15

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Meskipun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam hal konsumsi saja yang membahayakan dan diharamkan akan tetapi dari segi transaksi dan distribusi juga haram ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa jual beli barangbarang yang membawa kemudharatan itu diharamkan.

Sementara dalam hukum positif di telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis, serta efek dari narkoba. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴

Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba adalah dilarang keberadaanya apabila disalah gunakan dan bukan untuk kemaslahatan bahkan dilihat dari sisi kemaslahatan pun sebenarnya juga sangat kecil. Karena memang dampak negatifnya sangatlah besar yang mengancam jiwa, akal, agama dan harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia.

Besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut tentu harus disikapi dengan serius. Sebab hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

barang haram tersebut, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, artis, lembaga negara dan lainnya.

Keadaan ini perlu perhatian dari hukum secara tegas dan jelas karena merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi bahaya yang mengancam negara pada tindak penyalahgunaan narkotika harus bergerak lebih cepat mengingat tingkat kejahatan narkotika yang begitu kejam. Oleh karena itu hukuman luar biasa untuk mengimbangi kejahatan luar biasa narkotika perlu diberikan sebagai upaya penegakan hukum yang jelas, tegas, mampu melindungi negara dari ancaman, serta terpenuhi tujuan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara.

Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti qisas dan rajam. Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban alam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti terorisme, dan narkoba.

Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran Islam sendiri bahawa tindak kekerasan yang dilakukan se hingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati. Tujuan syari'at Islam, tidak lain untuk kemaslahatan umat.

Adapun maksud dari pembedaanannya adalah tidak lain demi tegaknya kemaslahatan dan ketentraman bagi setiap

anggota masyarakat. Sementara pidana Islam mencakup amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana hukuman Mati Pengedar Narkoba di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?”, dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum Islam memandang hukuman mati bagi pengedar narkoba?
2. Bagaimanakah hukum positif memandang hukuman mati bagi pengedar narkoba?
3. Bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Lampung?

B. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang mengarah pada masalah yang di kemukakan dalam sebuah penelitian. Tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problematika yang di kemukakan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum Islam dan Hukum Positif tentang vonis mati pengedar dan bandar narkoba.
2. Untuk mengetahui mengapa perlu penjatuhan vonis mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.
3. Untuk mendapatkan informasi pendapat hakim yang menangani perkara narkoba.

C.

Ma

nfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang teori hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba sebagai salah satu acuan penerapan putusan hukuman mati tersebut guna mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan, ketentraman dan kedamaian masyarakat.
2. Dalam ranah praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji peraturan tentang hukuman mati pada tindak pidana narkoba yang berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif karena penelitian ini menganalisis beberapa kasus-kasus yang terjadi terkait dengan tindak pidana narkoba, mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh sumber bahan hukum di atas maka, digunakan pendekatan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan atau dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai kajian pokok di dalam pendekatan kasus dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
- c. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukuman mati pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berdasarkan dengan norma-norma aturan hukum positif dan hukum Islam.

Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor perbandingan yang berkenaan dengan hukuman mati kasus narkoba.

- d. Tipe dari penelitian hukum ini adalah deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas, gamblang, rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai hasil pengkajian sesuai dengan bentuk dan format karya ilmiah.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukuman mati penyalahgunaan narkoba, pandangan hukum positif dan hukum Islam yang relevan, meliputi buku-buku referensi, majalah, koran, internet, makalah dan lain-lain.

- a. Bahan hukum primer bersumber dari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan narkoba, hadis-hadis tentang narkoba, pendapat ulama fikih tentang narkoba, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal penelitian, koran, khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier meliputi yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

C. Pengumpulan Data

Mengingat bahwa sumber data terdiri dari bahan-bahan hukum yang tersimpan di dalam peraturan perundang-undangan, Alquran, Hadis, literatur hukum Islam dan hukum positif, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi dengan melalui tahap yaitu :

- a. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa buku-buku, catatan, majalah, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba tinjauan hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Memeriksa bahan-bahan hukum apa yang tersedia di perpustakaan.
- c. Memisahkan dokumen yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian yaitu hukuman mati terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.
- d. Mengutip dokumen tanpa mengubah redaksi, sesuai dengan dokumen aslinya dengan mencantumkan sumber bacaan.

D. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui sejumlah tahap. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa data apakah sudah lengkap, cukup sesuai dengan kebutuhan penelitian atau belum. Selain itu juga mengoreksi data apakah bahan yang dikumpulkan ada kesalahan atau tidak.
- b. Sistematika, yaitu menyusun data sesuai dengan kerangka sistematika yang telah ditentukan berdasarkan urutan rumusan masalah.

E. Analisis Data

- a. Analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Penulis berusaha mendeskripsikan data-data tersebut secara mendalam tentang hukuman mati pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif.

- b. Analisis komparatif, yakni dengan cara membandingkan konsep dari obyek penelitian yang sudah dideskripsikan dengan jelas. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Setidaknya penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dalam penelitian ini memuat halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, pengesahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya :

- | | |
|----------|---|
| Bab I. | Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian. |
| Bab II. | Metode Penelitian
Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. |
| Bab III. | Kajian Pustaka
Bab ini memuat pengertian narkoba, pengaruh yang ditimbulkan dari narkoba, jenis-jenis hukuman narkoba, pidana narkoba dalam hukum positif, pidana narkoba dalam hukum Islam, |

penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.

Bab IV.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan secara analisis komaratif dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban dari masalah, yakni pembahasan terhadap pokok mengenai hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba di Lampung menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkoba

Ilmu kesehatan membutuhkan narkotika maupun zat lainnya untuk pengembangan pengobatan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya undang-undang, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Narkotika. Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan”.¹

Narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan narkoba.²

Narkoba di Indonesia digolongkan dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus penyalahgunaan

¹ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yayasan Bina Taruna : Jakarta, 1985), hal. 5

² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung, 1990), hal. 3

narkoba. Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam tidak selalu diartikan negatif. Sebab dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, codein hashisch, cocaine dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.³

Sedangkan psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif adalah zat atau kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis maupun fisik. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan.⁴

Menurut Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

³ Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987), hal 15.

⁴ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu:STAIN Datokarama, 2009), hal 221.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁵

Kemudian di Pasal 2 menyebutkan, *Prekursor* narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sementara itu, di dalam Pasal 3 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.⁶

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya.

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.⁷

Secara rinci berikut adalah jenis-jenis dari narkotika dan efek yang ditimbulkan:

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mardani, *Hukum Aktual Bogor*, (Ghalia Indonesia, 2009), hal 16-21.

1. Ganja

Ganja atau *cannabis sativa* merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, dan biji. Cara pengkonsumsiannya adalah dengan mengisapnya seperti rokok atau mencampurkannya dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat. Efek yang ditimbulkan dari ganja antara lain: Rasa gembira yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, menimbulkan halusinasi.

2. Morfin

Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari campuran antara getah poppy dengan bahan kimia lain. Efek yang ditimbulkan dari morfin adalah, menekan kegiatan system syaraf, memperlambat pernafasan dan detak jantung, memperbesar pembuluh darah, mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh.

3. Heroin

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin

menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

4. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, euforia, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

5. Ecstasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar).

Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup. Pengguna Sabu sering mempunyai kecenderungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika Sabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak

lagi bertambah. Namun jika dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap system syaraf, yaitu depressant, halusinogen, dan stimulant.

Sementara dalam hokum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan hukumnya secara khusus baik di dalam Alquran maupun hadis. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.⁸

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dan lain-lain. Sesuatu yang memabukkan dalam Qur'an disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.

⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal 74.

Narkoba termasuk dalam kategori *khamr*. Meskipun dalam arti sempit, *khamr* sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan. Karena itu sebagian ulama klasik mengartikan *khamr* adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. Paling tidak, *khamr* seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah *khamr*.

B. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Undang-undang tentang narkotika sebenarnya juga mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti misalnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dijelaskan dalam Pasal 3A menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 4 menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara di Pasal 5 menyebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.⁹

Sedangkan di dalam Islam kadang memperbolehkan beberapa jenis bahan maupun obat yang termasuk dalam narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredakan rasa sakit selama dalam kondisi darurat. Dalam keadaan tersebut masih dibolehkan menggunakannya sebagaimana pendapat para ulama.

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

Imam Nawawi berkata, “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi’iyah. Yang tepat adalah dibolehkan.” Al Khotib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi’iyah berkata, “Boleh menggunakan sejenis napza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.¹⁰

Narkoba bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktivitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkoba bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa.

Masalah timbul bila narkoba dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. Dalam <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-Islam>. Diakses 25 November 2017.

penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan NAPZA menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan NAPZA ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.

Dampak negatif yang ditimbulkan narkoba antara lain bisa menimbulkan gangguan mental/ jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (*psikiatri*). disebut gangguan mental organik. Disebut organik karena dengan ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan pada alam pikir, perasaan, dan perilaku. Secara medis, penyalahgunaan narkoba jelas merusak kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Penggunaan narkoba secara salah dapat menimbulkan dampak buruk terhadap penggunaanya. Efek buruk itu antara lain :

a.

epresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya: *morphin, opium, heroin, codein, pentazocine*, dan *naloxan*.

b. *Stimulan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara

waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nikotin, kokain, amphetamin, dan MDMA atau ekstasi.*

c.

Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.*

d.

diksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.

Menurut hukum Islam, Narkoba dikategorikan sebagai *Khamr*. *Khamr* adalah benda banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba antara lain :

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.¹¹

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman,

¹¹ QS. Al A'rof: 157

وَلَا تُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”¹²

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah).”¹⁴* Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا،
وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka

¹² QS. Al Baqarah: 19).

¹³ QS. An Nisa':).

¹⁴ HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309.

Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya.”¹⁵

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Kelima: Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya.”¹⁶ Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*. Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi *mudhorot* pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini.

Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Kemudian, dari Ummu Salamah, ia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”* (HR. Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309.

¹⁵ HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 10).

¹⁶ HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66.

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *dho'if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan."¹⁷

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan".

Seperti halnya pendapat Yusuf Al Qardawi Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat.

Jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam tiga masalah: (1) bolehkah

¹⁷ *Majmu' Al Fatawa*, 34: 204

mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit, (2) apakah narkoba itu najis, dan (3) apa hukuman bagi orang yang mengonsumsi narkoba. Menurut jumhur ulama, narkoba itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak *muskir* (memabukkan) yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh narkoba. Bagi yang mengonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman ta'zir (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina).¹⁸

Menurut ulama Hanafiyah, Ibnu 'Abidin berkata, "*Al banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan". Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". 'Alisy salah seorang ulama Malikiyah- berkata, "Had itu hanya berlaku pada orang yang mengonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan".

¹⁸ Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, *An Nawazil fil Asyribah*, Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama, 1432 H, hal. 205-229.

Sementara ulama Syafi'iyah, Ar Romli berkata, "Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al banj*), opium, dan beberapa jenis *za'faron* dan *jawroh*, juga ganja (*hasyisy*), maka tidak ada hukuman *had* (yang memiliki ketentuan dalam *syari'at*) walau benda tersebut dicairkan.

Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras, *pen*)". Begitu pula Abu Robi' Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar –yang terkenal dengan Al Bajiromi- berkata, "Orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman *had* berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam *syari'at*)."

Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman *hadd* –seperti ketentuan pada peminum miras.

C. Jenis-jenis Hukuman Narkoba

Hukuman bagi penyalahgunaan kasus narkoba berbeda-beda. Ada yang tergolong ringan ada yang sangat berat. Hukuman penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Perbuatan pidana yang menyangkut produksi dan

jual beli narkoba. Kasus ini yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkoba.

3. Perkara pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba. Dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasit narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status

barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuhan dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotikagolongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

D. Penggolongan Narkotika

1. Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan

ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

2. Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan

dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan daripemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakanbagi jiwa manusia.¹⁹

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
4. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
5. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I (Pasal 114);
6. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);

¹⁹ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 2001) hal. 5.

9. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
10. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan II (Pasal 119);
11. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(Pasal 124);
16. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan III (Pasal125);
17. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).

E. Pidana Narkoba Dalam Hukum Positif

Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

sebagai berikut:

2. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
3. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
4. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif.
5. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
6. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan

4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

F. Pidana Narkoba Dalam Hukum Islam

Hukum Islam menyebut pidana dengan *Jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.²⁰

Pemidanaan dalam istilah pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Dalam hukum Islam suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur Jarimah. Unsur-unsur untuk jarimah tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Unsur formil yaitu adanya Nash yaitu ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai

²⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009), hal 13.

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari berat ringannya hukuman pidana di bagi menjadi tiga;

1. *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah), yang tidak bias ditawarkan dengan alasan apapun. Meliputi zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras, *riddah* (murtad).
2. *Jarimah Qisash Diyat* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya adalah *qisash* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (ganti rugi). Hukumannya ditentukan oleh perorangan yaitu korban dan walinya. Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.
3. *Jarimah Ta'zir* yaitu memberi pelajaran. Hukuman *ta'zir* merupakan pelanggaran selain *had* dan *qisash diyat*, karena tidak diatur dalam *nash*. Untuk menentukan hukumannya maka diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Pemberian hukuman pidana Islam di muat dalam lima bentuk pokok hukuman yaitu;pidana pengawasan, pidana ganti rugi, pidana penjara, pidana badan dan pidana mati. Pidana mati yang dimaksud adalah pidana maksimal. Hukuman mati tidak semata-mata di terapkan, akan tetapi harus

memenuhi unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus jarimah. Unsur umum yaitu ;

- a. Unsur Formil (*ar-rukṇ as syar'i*) : danya undang - undang atau nash.
- b. Unsur materiil (*ar-rukṇ al-madi*) : adanya sifat melawan hukum.
- c. Unsur Moril (*ar-rukṇ al-adabi*) : pelakunya Mukalaf

Sementara pidana khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda, perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.²¹ Konsekuensi dari pelaku tindak pidana Islam adalah di ancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup.

G. Penyalahgunaan Narkoba di Lampung

Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung rawan terhadap peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat yang cukup tinggi di banding dengan provinsi lainnya di Sumatera. Salah satu penyebabnya karena Lampung merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera sehingga menjadi jalur transit pengiriman gelap antarpulau barang haram itu.

Untuk itu, Lampung sangat strategis sebagai penyuplai

²¹ Ahmad Hanafi, *Azaz - azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 36.

narkoba, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kejahatan narkoba di Lampung sudah sangat serius karena menjamah ke berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pejabat, pegawai negeri sipil (PNS) hingga anggota Dewan. Bahkan, sepanjang 2016 Polda Lampung menangani 964 kasus. Dari jumlah barang bukti sebesar itu, mengungkapkan narkoba sudah merebak di mana-mana.

Untuk memberantas peredaran narkoba tersebut sejumlah lembaga penegak hukum di Lampung terus bekerjasama. Mulai dari Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, pejabat pemerintah, hingga masyarakat. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigadir Jenderal Polisi Sukamso mengatakan, Indonesia saat ini darurat narkoba hampir seluruh wilayah, termasuk di Lampung.²²

Kekhawatiran bangsa Indonesia terhadap darurat narkoba itu benar. Kita lihat prevalensi dari tahun ke tahun pengguna narkoba terus naik. Akan tetapi, dibandingkan dengan provinsi lain, jumlah pengguna narkoba di Lampung turun. Ini dilihat dari posisi Lampung saat ini yang menduduki peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan sensus tahun 2015 yang dikeluarkan tahun 2016, saat ini pengguna narkoba di Lampung jumlahnya mencapai 72 ribu. Memang jumlahnya naik, tapi ketika dibandingkan dengan provinsi lain jumlah pecandunya turun. Usia pengguna narkoba terpapar semakin turun, kalau dulu pengguna narkoba mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi, saat ini mulai terpapar dari tingkat SMP bahkan SD, meski tidak secara langsung, tapi melalui jajanan seperti permen yang mengandung narkoba.

²² Lampung Post, *Lampung Zona Merah Narkoba*, 26 Februari 2017.

Dilihat dari geografisnya Lampung memang sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebagai daerah transit, transaksi barang-barang haram dari Batam, Riau, Medan, Aceh, dan lain-lain tersebut lewat Lampung.

Meski bukan daerah tujuan utama pemasaran, Lampung sebagian. Akhirnya masyarakat kita semakin banyak yang terpapar. Yang paling mengkhawatirkan adalah modus narkoba dari sudut ekonomi. Sebab, yang dicari bukan hanya uang semata. Uang bisa jadi nomor dua. Tapi tujuan mereka adalah menularkan sehingga semakin banyak yang terpapar narkoba.

Selain Polda Lampung bersama jajaran Polres dan Polresta di Kabupaten/ kota yang intens memberantas narkoba, di Provinsi Lampung saat ini sudah ada empat BNN kabupaten, meliputi Metro, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Tingkat pengguna dan pemasok paling tinggi adalah di Bandar Lampung. Makanya daerah ini masuk ke zona merah peredaran barang haram tersebut.

Sebab, banyak penduduk yang melakukan tindak pidana narkoba, baik pemakai maupun pengedar di wilayah tersebut. Ada banyak faktor kenapa Bandar Lampung menjadi daerah paling banyak pemakainya. Ini dilihat dari sisi banyaknya penduduk, tempat hiburan, dan Bandar Lampung menjadi ibu kota Provinsi Lampung.

Pelaku penyalahgunaan narkoba di Lampung juga sudah banyak yang diadili. Seperti dua bandar narkoba yang divonis mati adalah Leong KimPing alias Away (40), warga Malaysia, atas kepemilikan sabu seberat 45 kg, dan Enrizal alias Buyung, warga Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan kurir ganja 3,5 ton. Mereka merupakan terpidana mati dari putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, pada 2012.

Pelaku sudah banyak yang ditangkap dan dijebloskan kedalam tahanan, namun penangkapan terhadap pelaku penyelundupan narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, sudah berkali-kali dilakukan. Tapi jumlah mereka seolah tak ada habis-habisnya. Penyelundupan narkoba lewat gerbang Sumatera menuju Pulau Jawa terbukti sulit ditekan apalagi diberantas.

Selama Oktober 2013 saja sedikitnya sudah enam kali penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah digagalkan petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Lampung Selatan. Polisi menangkap narkoba sebanyak 13,5 kg, dengan perincian sabu-sabu 11,5 kg dan heroin jenis putau 2 kg, disita dari bagasi kanan bus Medan Jaya BK-7094-UA jurusan Medan-Jakarta saat hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Polisi juga menggagalkan penyelundupan 2 kg sabu-sabu senilai Rp4 serta menyita 8.600 butir pil psikotropika.

Fakta ini menunjukkan betapa mafia narkoba tetap punya nyali dan celah untuk mendistribusikan narkoba melalui Bakauheni menuju Pulau Jawa. Mereka diyakini memiliki jaringan sangat luas dan canggih. Pelabuhan Bakauheni kerap dijadikan jalur emas penyelundupan narkoba karena pengamanannya dinilai sangat lemah. Alat pendeteksi narkoba di pelabuhan tersebut sudah sejak dua tahun lalu rusak dan tak kunjung diperbaiki. Pemeriksaan yang dilakukan selama ini hanya mengandalkan naluri petugas tanpa bantuan anjing pelacak.

Kondisi tersebut sangat dipahami betul oleh sindikat narkoba. Modus pengirimannya pun terus berganti-ganti untuk mengelabui petugas. Cara-cara menyelundupkan narkoba mulai dari menelan, menaruh di tas atau kardus yang dicampur makanan, menyimpan dalam bodi mobil,

hingga mengirim lewat jasa pengiriman barang telah dilakukan para bandar narkoba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹

Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu. Pelaksanaan eksekusi mati di wilayah Indonesia tidak hanya terpatok pada keterangan di atas.

Misalnya, di Aceh eksekusi bisa dilaksanakan dengan lembing, di Bali dapat dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke laut, sedangkan pada suku batak dilaksanakan dengan sistem alternatif dimana apabila pembunuh tidak membayar uang salah maka eksekusi bisa dilaksanakan, dan berbagai macam jenis-jenis eksekusi mati lainnya. Dengan memperhatikan kebiasaan (adat) dan hukum adat dari Aceh sampai Irian memperlihatkan kepada

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 187.

kita pidana mati dikenal oleh semua suku di Indonesia. Hingga penulis menarik kesimpulan bahwa bukan Belanda lah yang memperkenalkan pidana mati pada bangsa ini.

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wet boek van Strafrecht*" yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP.

Kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (persetujuan Presiden).

Maka jelaslah disini bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana *penal* yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-

orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhakum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam S. 1945 : 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati”.

Untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada UU No. 2 (PNPS) tahun 1964. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (*Retentionist Country*). *Retentionist* maksudnya *de jure* secara yuridis, *de facto* menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini.

Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya.

B. Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo,

Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa "alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan" bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan "pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar."

Selanjutnya, Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*).

Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Penulis bergumam seperti itu didasarkan pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Hal ini dapat penulis gambarkan, melalui pendapatnya yang menyatakan: "bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati

dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)".²

Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditrik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Untuk memperkuat argumen di atas, maka alangkah baiknya penulis memperkuatnya dengan menyajikan bunyi dari Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut, yang menyatakan : Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf (a); Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat 2 (huruf) a dan Ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara kita dan masih layak

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 89.

dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bersebrangan dengan penguasa.

C. Hukuman Mati Pengedar Narkoba

Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 :

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dan paling banyak
Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 144.

Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116,

pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Ayat 2: ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :

- a. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
- b. Sebagai Perwujudan pembalasan.
- c. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
- d. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara.
- e. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di

singkat KUHP) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghambaan Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan Pasal-Pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangnya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.⁴

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan

⁴ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal 7.

pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

1. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lwan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
2. Upaya menerbitkan beberapa katentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya

merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.⁵

Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan underogable atau hak yang bisa dibatasi. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar konstruksi pidana mati. Dalam hal ini pemeberian sanksi pidana mati dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karna dalam penerapannya sangksi pidana mati amat sangan menankutkan bagi siapapun, dengan tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasib sama pada terpidana mati lainnya.

D. Hukuman Mati Menurut Hukum Islam

Kata narkotika tidak tercantum dalam Alquran maupun Hadis. Akan tetapi narkotika ini dikaitkan dengan kata *khamar* karena sama-sama ada dampak yang

⁵ Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hal 306.

ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum Islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum Islam, dan salah satu sumber hukum Islam itu yaitu dengan menggunakan metode *qiyas* atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Oleh karena itu karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka ayat dan hadis yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika. Narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia maka orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat.

Dalam konteks fikih di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian besar terhadap beberapa vonis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana perkara narkoba yang mengubah hukuman mati menjadi vonis hukuman penjara waktu tertentu, baik menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 15 tahun atau 12 tahun.

Perhatian besar tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban, tugas dan tanggung jawab MUI untuk melindungi umat Islam dan bangsa dari kejahatan luar biasa narkoba. MUI berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita selain terorisme dan korupsi. Ketiganya merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan

hukum yang luar biasa juga. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan fatwa hukum Islam telah mengeluarkan fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati melalui fatwa Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Di dalam fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2005 tersebut, MUI secara tegas menyatakan: Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.⁶

MUI menyayangkan apabila terhadap terpidana perkara narkoba diberikan grasi, karena merusak komitmen dan perjuangan bangsa kita dalam memberantas kejahatan narkoba. MUI mengkhawatirkan jika hukuman mati tersebut tidak diterapkan akan mendorong peningkatan peredaran narkoba di tanah air yang akan menambah jumlah korban dan kerusakan bangsa yang makin parah.

Adapun pembuktian dalam hukuman pidana khamr menurut ulama adalah bahwa hukuman peminum khamr ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat adil. Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang hukuman berdasarkan bau mulut bagi peminum khamr.

Pendapat Imam Malik dan jumhur fuqaha Hijaz bahwa hukuman harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan

⁶ Maruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis mati kejahatan Narkoba*, Kamis, 18 Oktober 2012, Terakhir Diperbaharui Kamis, 18 Oktober 2012.

kesaksiannya kepada penguasanya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Iraq dan segolongan jumhur Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa had tidak ditetapkan karena bau mulut peminum khamr.⁷

Adapun eksekusi hukuman mati dengan *ta'zir*, tidak ada keterangan yang pasti tentang alat yang digunakan untuk eksekusi. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang lebih mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.⁸

E. Hukuman Mati Pengedar Narkoba Dalam Perspektif HAM

Hukuman mati memang masih menuai politik. Majelis Umum PBB sebagai organisasi dunia dalam konvenan hak-hak sipil dan politik menyatakan tidak menyalahkan atau membenarkan hukuman mati, akan tetapi berusaha memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati. Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berupa Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of*

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992), hal.135

⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras,2009), hal. 199.

Those Facing the Death Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- a) Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius'.⁹, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
- c) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- d) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- e) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah

⁹ Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary", Revisi kedua, (N.P. Engel, 2005), hal 15.

- persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- f) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
 - g) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
 - h) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.

Isi pokok konvenan secara tidak langsung menolak hukuman mati terhadap pidana tertentu (termasuk pidana narkoba) dengan alasan HAM yang diungkapkan dengan bahasa memperketat hukuman mati. Jika dilihat dari pasal-pasal konvenan tersebut ini memberikan pembelaan pada terpidana. Jika pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan narkoba maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan terhadap korban diabaikan, melihat jumlah korban narkoba itu lebih banyak dari pada jumlah terpidana. Dengan kata lain kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul “Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati”, akan tetapi tidak mengeluarkan jaminan terhadap korban akibat tindak

pidana terutama narkoba.

Sedangkan hukuman mati pada pidana narkoba adalah memberikan jaminan terhadap korban atas hak-hak korban yang diambil oleh terpidana, sehingga konvensi HAM tersebut tidak bisa membatasi hukuman mati terhadap pidana narkoba atas dasar lebih menguntungkan terpidana dari pada korban narkoba.

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Berikutnya UUD menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*"¹⁰

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan "Hukum Kodrat", sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

¹⁰ Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan :

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terpidana narkoba tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, yaitu melanggar hak hidup masyarakat umum yang dilindungi undang-undang. Sehingga terpidana narkoba dapat dikenai hukuman mati karena dianggap tidak berhak atas hak asasinya yaitu hak hidup.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi juga menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dirampas dengan alasan apapun, akan tetapi dalam hukum positif Indonesia menggunakan azas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga posisi di sini posisi

UUD 1945 sebagai suatu ketentuan umum kemudian diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan khusus yaitu Undang-undang HAM. Jadi ketentuan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Jelas hukuman mati terhadap bandar narkoba tidak bertentangan dengan HAM. Sebab penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Para pecandu maupun narkoba umumnya adalah remaja yang tentunya adalah harapan bagi keluarga, agama, dan bangsanya. Sehingga akibat ulah pengedar narkoba inilah semuanya menjadi rusak. Narkoba telah merusak generasi muda Indonesia.

F. Penerapan Hukuman Mati Pengedar Narkoba di Lampung

Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung menduduki peringkat yang cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat sepanjang tahun jumlah pengguna dan pelaku penyalahgunaannya ditangkap polisi maupun BNN. Sepanjang 2016 polisi mengungkap 964 kasus yang semuanya memenuhi syarat dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.

Hakim di sejumlah pengadilan di Lampung juga ada yang menerapkan hukuman mati terhadap pengedar maupun bandar narkoba. Seperti Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, menjatuhkan vonis mati bagi Enrizal alias Buyung (45), pemilik ganja seberat 3,5 ton. Sedang kurirnya, Juni Ardiwan (39), divonis seumur

hidup. Putusan Majelis Hakim yang diketuai Aryo Widyatmoko dengan anggota Afit Rufiadi dan Oka P.B. Gocara, itu lebih berat daripada tuntutan Jaksa Sunarto yang menuntut keduanya penjara seumur hidup.

Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan, yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba dan dapat merusak generasi muda. Sementara yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang dan sopan selama menjalani persidangan. PN Kalianda telah dua kali memvonis mati terdakwa kasus narkoba. Vonis mati dijatuhkan kepada Leong Kim Ping, warga negara Malaysia yang merupakan terdakwa kasus sabu-sabu seberat 45 kg dan 170 pil ekstasi.

Tidak hanya pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga menolak banding Leong Kim Ping alias Away (39), warga negara Malaysia terpidana kasus narkoba. Pemilik 45 kg sabu-sabu ini tetap divonis hukuman mati. Surat putusan banding dari PT Tanjungkarang No. 138/Pid/2012/PT.TK tanggal 3 September 2012, menguatkan putusan PN Kalianda No. 94/Pid.B/2012/PN.KLD tanggal 17 Juli 2012. Hasil putusan Banding menguatkan putusan PN Kalianda yang memvonis Leong Kim Ping dengan hukuman mati.¹¹

Isi amar putusannya menyatakan terdakwa Leong Kim Ping alias Away telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

¹¹ Lampung Post, *Pemilik 45 Kg Sabu Tetap Dihukum Mati*, 13 September 2012

gram dan menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram. Keluarnya putusan banding dari PT Tanjungkarang itu menguatkan putusan PN dan terdakwa Leong Kim Ping tetap divonis mati.

Penjatuan vonis mati itu dilakukan hakim di Lampung dengan mengacu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini, ada enam pasal yang mengatur hukuman pidana mati yakni pasal 113, 114, 116, 118, 119, dan 121.

Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Leong Kim Ping adalah tindak pidana narkotika dan perlu mendapat perhatian pengadilan. Para hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan.

G. Komparasi Hukuman Mati Pengedar Narkoba Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukuman mati terhadap pengedar maupun bandar narkoba baik menurut Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki korelasi. Sehingga setelah dikomparasikan terdapat persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut. Dari segi persamaan antara lain sebagai berikut :

1. Baik hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkoba dapat diterapkan sebagai salah satu produk hukum dalam system hukum bagi pelaku kejahatan narkoba (*khamr*).
2. Hukum Islam maupun hukum positif melihat narkoba sangat merugikan, sehingga dapat merusak akal dan jiwa manusia, dapat membunuh orang banyak dalam waktu

yang singkat. Sehingga hukuman mati adalah solusi untuk memusnahkan pelaku kejahatan narkoba dan untuk memelihara kepentingan umum.

3.

ukum Islam maupun hukum positif mengenal istilah hukuman maksimal, sehingga hukuman mati terhadap pidana narkoba merupakan penerapan hukuman puncak setelah melalui beberapa tahapan dan pertimbangan baik bagi terpidana, korban serta akibatnya bagi masyarakat luas, perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menandakan tentang ketegasan hukum positif dan hukum Islam dalam upaya menegakkan hukum.

4.

ukum Islam dan hukum positif dalam memandang hukuman mati mengesampingkan hak azasi pelakunya demi menjaga kemaslahatan hidup orang banyak. Sebagaimana hukum Islam bahwa untuk tujuan kemaslahatan umat manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) hak hidup terpidana dapat dikesampingkan.

Selain memiliki persamaan, hukum Islam dan hukum positif memiliki sejumlah perbedaan dalam memandang hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Perbedaan itu sebagai berikut :

1. Dari segi dasar hukum, Islam menggunakan dasar hukum mulai dari Alquran, hadis, fikih dan pendapat ulama.
2. Sedangkan dasar hukum positif di Indonesia antara lain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketiga undang-undang tersebut membolehkan hukuman mati.

Selain itu, hukum Islam menganalogikan narkoba dengan *khamr*, karena cirri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sama dengan akibat *khamr* yaitu memabukkan dan membuat lemah. Sehingga penetapan hukuman mati disamakan dengan *khamr*, yang mana peminum *khamr* dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Alquran dan hadis nabi. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah pendapat dan kesepakatan jumhur ulama. Sehingga menurut penulis belum ada kepastian hukum seperti yang ada dalam nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, aturan yang mengatur tentang narkoba selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis pidananya. Kebolehan hukuman mati ini dijadikan pedoman hakim di sejumlah pengadilan di Provinsi Lampung dalam rangka memberikan hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba.

Hukum positif dalam undang-undang narkotika selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati yang dijadikan pedoman hakim dalam memberikan hukuman terpidana mati narkotika.

Sehingga sudah adanya kepastian hukum dalam undang-undang. Hukum Islam tidak ada istilah

narkotika yang kemudian para ulama fiqh menganalogikan narkotika dengan *khamr*, karena cirri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sama dengan akibat *khamr* yaitu memabukkan dan membuat lemah. sehingga penetapan pidana narkotika disamakan dengan *khamr*, yang mana peminum *khamr* dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Alquran dan hadis. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah pendapat dan kesepakatan jumbuh ulama. Sehingga menurut penulis belum ada kepastian hukum seperti yang ada dalam nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam.

Hukum positif di Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi selaku pemegang otoritas menafsirkan konstitusi telah menyatakan hukuman mati tak bertentangan dengan hak asasi manusia. Terlebih hukuman itu bagi para kartel mafia narkoba. Keputusan penerapan hukuman mati haruslah kita dukung.

Tetap menegakkan hukuman mati merupakan sinyal kuat bangsa Indonesia dan Provinsi Lampung tidak mau menyerah kalah oleh mafia narkoba. Jangan sampai bandar narkoba makin berani bersindikat, meneror warga dengan ilusi barang haram itu. Para teroris narkoba harus mendapat ganjaran berat menggetarkan hati mereka sehingga tidak ada lagi yang berani main-main narkoba di Indonesia, termasuk Lampung.

Jutaan orang itu menjadi konsumen para mafia pengedar narkoba. Mereka menyelundupkan barang haram itu menggunakan beragam cara hingga sampai ke pasar Tanah Air. Dari jalur udara hingga laut, menembus pelabuhan legal maupun ilegal. Pengendali besarnya

berasal dari luar negeri, yakni Nigeria dan Tiongkok. Di Pelabuhan Panjang, 57,701 kilogram sabu-sabu di tiga kontainer pernah terungkap. Jika 1 gram dipakai empat orang, 346.206 orang terancam menyalahgunakannya. Kemudian kasus lainnya, 4 kg sabu asal Malaysia diungkap Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri di pelabuhan ujung Sumatera tersebut. Sabu-sabu asal negeri jiran itu diselundupkan melalui jalur laut Port Klang Malaysia. Barang haram senilai Rp8 miliar itu berpotensi mengancam 24 ribu jiwa. Di Tanah Lada, peredaran narkoba masuk kategori gawat. Narkoba sudah masuk ke pelosok daerah dan menimbulkan tindak kriminal lainnya.

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan mengenai hukuman mati terhadap pengedar maupun bandar narkoba di Lampung menurut hukum Islam dan hukum positif pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukuman mati kepada pengedar dan bandar narkoba dalam perspektif hukum Islam boleh diterapkan. Hal itu sesuai dengan Alquran dan Hadis yang selanjutnya diperjelas dan dipertegas dengan pendapat ulama fikih. Vonis mati dalam kasus narkoba dapat dilakukan dengan berbagai alasan hukum dan kemaslahatan. Hukum Islam ada untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sedangkan narkoba melanggar kelima hal tersebut.
2. Menurut hukum positif di Indonesia, hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba dapat diterapkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut didalamnya berisikan pasal-pasal yang mengancam hukuman mati terhadap penyalahgunaan narkoba. Vonis mati dalam kasus narkoba juga tidak bertentangan dengan UUD 45 dan undang- undang HAM.

3. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) di Provinsi Lampung juga menerapkan hukuman mati terhadap bandar narkoba. Para pengadil menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim berpendapat tindak pidana narkoba tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga penjatuhan pidananya juga harus luar biasa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat hendaknya menghindari narkoba dan ikut berperan aktif bersama pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
2. Kepada pemerintah hendaknya semakin masif menyosialisasikan tentang ancaman dan bahaya narkoba serta menutup tempat-tempat yang mudah untuk beredarnya narkoba.
3. Kepada penegak hukum wajib mengusut tuntas kasus peredaran narkoba di Lampung dan menghukum pelakunya seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat Provinsi Lampung masuk dalam zona merah narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Azaz- azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009).
- Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2010).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatal Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah, 1992).
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yayasan Bina Taruna : Jakarta, 1985).
- Lampung Post, *Lampung Zona Merah Narkoba*, 26 Februari 2017.
- Lampung Post, *Pemilik 45 Kg Sabu Tetap Dihukum Mati*, 13 September 2012.
- Maruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis mati Kejahatan Narkoba*, Kamis, 18 Oktober 2012, Terakhir Diperbaharui Kamis, 18 Oktober 2012.

- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Manfred Nowak, “*U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*”, Revisi kedua, (N.P.Engel, 2005).
- Mardani, *Hukum Aktual Bogor*, (Ghalia Indonesia, 2009).
- _____, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Media Indonesia, *Percepat Eksekusi Mati 150 Mafia Narkoba*, 16 April 2016.
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. Dalam <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam>. Diakses 25 November 2017.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Ridha Ma’roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987).
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti : Bandung, 1990).
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung :
MandarMaju, 2009).

Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy,
An Nawazil fil Asyribah, Dar Kunuz Isybiliya, 1432 H.



Ministry of Health and Family Welfare, Government of India